

Modal Sosial Masyarakat Digital dalam Diskursus Keamanan Siber

M. Fadjroel Rachman

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi
Email: mfadjroelrachman@gmail.com

Novri Susan

Universitas Airlangga, Surabaya
Email: novri.susan@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Masyarakat digital adalah bentuk lebih lanjut dari interaksi sosial manusia dengan eliminasi batasan kontak sosial secara radikal. Aktor sosial mampu menyampaikan pesan dan memperjuangkan kepentingan melalui mode-mode tindakan yang cepat. Tulisan ini bertujuan melakukan redefinisi modal masyarakat digital secara sosiologis. Konsep sosiologis tentang modal sosial memiliki definisi yang berbeda dalam masyarakat digital saat ini. Definisi sosiologis umum, modal sosial adalah jaringan sosial. Modal sosial memberi kemampuan masyarakat dan para aktor sosial untuk membangun masyarakat yang kuat dalam banyak kepentingan seperti keamanan, penyelesaian konflik, pemberdayaan ekonomi, dan banyak hal lainnya. Namun, terdapat potensi pergeseran definisi tentang modal sosial ketika masyarakat bertransformasi secara digital. Tulisan ini secara khusus menguraikan secara teoritis bagaimana masyarakat digital melakukan definisikan ulang konsep modal sosial terutama berkaitan dengan masalah keamanan siber (cyber security). Masalah keamanan siber merupakan tantangan tersendiri. Masyarakat dan aktor sosial menghadapi berbagai ancaman sosiologis seperti pembajakan identitas, kejahatan dunia maya, dan kekerasan. Penelitian ini menggunakan data teks digital dan interpretasi teoretis pendekatan eklektis untuk mengajukan wacana tentang modal sosial, masyarakat digital, dan keamanan siber.

Kata kunci: *Modal sosial, masyarakat digital, keamanan, keamanan siber*

1. Pendahuluan

Masih belum ada definisi pasti tentang keamanan siber (*cyber security*) dari pendekatan sosiologi. Sebagian besar definisi berasal dari ranah teknologi internet. Duncan Kingori mengungkapkan sepuluh risiko dalam masalah keamanan siber, yaitu Pelanggaran Data, Ketidakamanan Antarmuka Pengguna Aplikasi (API), Penyalahgunaan Layanan *Cloud*, Serangan Malware, Kehilangan Data, Kata Sandi Tunggal, Ancaman dari Aktivitas Orang Dalam, Internet untuk Segala, dan Sistem *Shadow IT* (Kingori, 2019).

Pada sisi lain, kajian tentang modal sosial dalam masyarakat digital telah dilakukan oleh beberapa ahli ilmu sosial. Hampir semua kajian tersebut merupakan upaya untuk menganalisa bagaimana pengaruh modal sosial terhadap kesenjangan digital (Ragnedda dan Ruii, 2017; Chen, 2013). Akses internet oleh para aktor sosial dalam beberapa hal ditentukan oleh modal

sosial seperti jejaring sosial atau koneksi sosial. Modal sosial yang kuat akan meningkatkan peluang akses internet. Oleh karena itu, para aktor dengan modal sosial dapat beradaptasi dan atau mengelola dunia yang hidup dalam masyarakat digital. Namun, masih sedikit kajian di bidang sosiologi yang mengkaji kemungkinan redefinisi modal sosial dalam masyarakat digital terkait dengan isu keamanan siber. Bisa dikatakan, tulisan ini mengawali kajian sosiologi tentang modal sosia dalam masyarakat digital dalam konteks isu keamanan siber.

Terminologi keamanan siber terdiri dari dua konsep, yaitu siber (*cyber*) dan keamanan (*security*). Keamanan, menurut para ilmuwan sosial, adalah absennya ancaman terhadap ‘nilai yang diperoleh’ (Wolvers dalam Baldwin, 1997). Nilai-nilai yang diperoleh, dalam tulisan ini, dapat ditemukan dalam bentuk kepemilikan materi, wilayah, identitas, status sosial, mata pencaharian dan unit sosial seperti keluarga atau komunitas. Menurut Susan (2019), ilmu sosial, khususnya kajian konflik dan perdamaian, menggolongkan keamanan menjadi dua konsep, yaitu keamanan tradisional (*traditional security*) dan keamanan non tradisional (*non-traditional security*). Keamanan tradisional mengacu pada ancaman fisik, termasuk masalah wilayah, tanah dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsep keamanan tradisional, harus ada suatu sistem yang menangani, baik untuk mencegah maupun mengatasi ancaman eksternal dan internal, agar negara dan masyarakat tetap aman dari ancaman fisik. Instrumen keamanan tradisional antara lain militer dan polisi serta teknologi persenjataan. Sedangkan keamanan non tradisional merupakan konsep yang lebih luas dari keamanan tradisional. Yelery mengungkapkan empat variabel atau dimensi dari keamanan non-tradisional yaitu keamanan manusia, keamanan terhadap kekerasan dan kejahatan non-militer, keamanan energi, dan keamanan lingkungan (Yelery, 2006; 38-45).

Konsep keamanan dalam ilmu sosial, argumentasi artikel ini, mengimplikasikan kebutuhan untuk memperluas konsep keamanan siber. Berdasarkan konsep keamanan di atas, keamanan siber merupakan mekanisme dan proses pencegahan dan penyelesaian segala ancaman oleh aktor digital terhadap suatu negara dan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan siber tidak hanya mengenai keamanan sistem internet atau ancaman terhadap teknologi informasi. Keamanan siber juga mencermati tindakan para aktor digital yang dapat membahayakan keamanan tradisional dan non-tradisional masyarakat dan negara. Secara sosiologis, aksi aktor digital ditemukan dalam bentuk produksi dan reproduksi bahasa. Melalui bahasa, para aktor digital membangun ‘proyek kepentingan’ seperti jejaring sosial, kelompok bisnis, transaksi, kontrol, kekerasan, dan dominasi.

Manuel Castells berpendapat bahwa manajemen informasi memiliki peran sentral dari dinamika masyarakat sebab pembentukan masyarakat jaringan didorong oleh informasi

(Castells, 1996). Informasi dibuat oleh aktor sosial, individu dan kelompok, melalui bahasa. Sedangkan bahasa adalah instrumen relasi kekuasaan oleh kepentingan dan pengetahuan di balik bentuk-bentuk simbolik bahasa (Berger dan Luckman, 1966; Habermas, 1984; Bourdieu, 2014). Terkait dengan isu keamanan siber, bahasa masyarakat digital merupakan instrumen para aktor digital untuk mewujudkan proyek kepentingan. Kemudian, bahasa dalam masyarakat digital didesain dengan sengaja oleh para aktornya untuk menjadi cara, instrumen, mencapai kepentingan.

Veronica Koman, seorang aktivis hak asasi manusia, dituduh menjadi ancaman keamanan nasional oleh polisi Indonesia karena telah membuat bahasa provokatif dengan menyebarkan informasi yang salah di media sosial *Twitter* tentang kasus mahasiswa Papua yang ditangkap polisi di Surabaya (Kompas.com, 2019). Tindakan digital Veronika Koman dapat dilihat sebagai bahasa yang dirancang dan didesain sebagai cara untuk mewujudkan kepentingan tertentu. Pada waktu yang sama, menurut polisi, mobilisasi massa dan kekerasan di Papua adalah bagian dari efek bahasa Koman. Unjuk rasa dan kerusuhan sosial telah menewaskan tiga puluh tiga warga di Wamena, Papua (Suara.com, 2019). Dalam hal ini, menurut pandangan kepolisian, Veronica Koman merupakan salah satu aktor digital yang mengancam masyarakat dan negara. Pada saat bersamaan, mode tindakan masyarakat mengelola suatu informasi dalam ranah digital pada dasarnya dibangun dari model modal sosialnya atau jaringan sosialnya. Informasi dari banyak aktor digital, termasuk Veronika Koman, diterima oleh kesadaran kolektif dari jaringan sosial masyarakat Papua sebagai realitas obyektif. Penerimaan realitas obyektif dari informasi Veronika Koman menjadi dasar dari produksi tindakan dalam bentuk protes massa.

2. Sosiologi Digital

2.1. Kesadaran Radikal

Sosiologi digital, disiplin baru dalam sosiologi, memperhatikan kehidupan sehari-hari dari para aktor sosial dalam masyarakat digital (Lupton, 2015). Masyarakat digital mengatasi masalah batas interaksi sosial. Para aktor sosial dapat mengirimkan pesan dan melakukan pertukaran atau transaksi sosial ekonomi secara instan. Partisipasi dan aspirasi warga negara kepada pemerintah dimediasi oleh infrastruktur digital, atau Lupton menyebutnya 'teknologi digital' (Lupton, 2015; 7), termasuk perangkat lunak dan perangkat keras komputer dan gawai. Aktor sosial yang mampu mengirim dan menerima informasi secara cepat melalui dunia digital inilah yang disebut sebagai aktor digital.

Infrastruktur digital memfasilitasi aktor sosial untuk melakukan produksi dan reproduksi bahasa sebagai cara mencapai kepentingan tanpa penundaan yang berarti. Oleh karena itu, keputusan dan berbagai tindakan akan diambil tanpa harus kontak sosial secara fisik (interaksi sosial fisik). Budaya baru, nilai-nilai sosial dan bentuk material seperti seni, *fashion*, bangunan, dan lain-lain, dibangun begitu cepat. Beberapa kebijakan negara dapat segera diubah dan direvisi ketika ada tekanan politik negara oleh masyarakat digital melalui jaringannya. Perubahan sosial dilakukan secara lebih dinamis, mengejutkan, dan tidak dapat diprediksi.

Infrastruktur digital dan *big data* yang ditopang oleh *search engines* dan *platform* media sosial adalah kotak ajaib bagi masyarakat digital untuk memperoleh sumber daya—informasi. Semua informasi yang dibutuhkan tersedia dalam *big data*. Dengan demikian, para aktor sosial masyarakat digital dapat bergerak sangat cepat untuk bertindak berdasarkan informasi yang ada di dalam *big data*. Terdapat *interplay* atau ‘dualitas’ (Giddens, 1996) antara infrastruktur digital — *big data* dan aktor sosial digital. *Interplay* tersebut menghasilkan bentuk kesadaran baru para aktor sosial yang lebih radikal. Dengan kata lain, terdapat kesadaran radikal yang terus tumbuh. Radikal, secara etimologis berasal dari kata radikalisme yang berarti 'akar'. Namun, dalam konsep konstruksi sosial, radikal adalah keinginan akan proses perubahan secara cepat tanpa kompromi dari alternatif pemecahan lain. Dalam tulisan ini, kesadaran radikal masyarakat digital sebagai proses yang saling mempengaruhi (*interplay process*) dapat didefinisikan sebagai bentuk baru dari mode tindakan memproduksi dan mereproduksi pengetahuan dan bahasa dengan tujuan mencapai kepentingan yang terdiri dari sumber daya baik materi maupun non materi tanpa membuka peluang tindakan kompromi atau dialog.

Masyarakat digital, pada dasarnya, adalah bentuk interaksi antar kesadaran radikal para aktor digital. Diperlukan adanya studi yang lebih empiris untuk membenarkan dalil ini. Namun demikian, seperti yang juga dijelaskan Lupton, masyarakat digital adalah tentang pergerakan individu, atau aktor sosial yang begitu cepat (Lupton, 2015). Pertanyaan sosiologis, secara mendasar, adalah mengapa dan bagaimana gerakan aktor sosial itu begitu cepat menciptakan keputusan dan berbagai tindakan dalam arena sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan? Penulis berpendapat bahwa kesadaran radikal adalah realitas sosiologis masyarakat dunia dalam menciptakan batas-batas yang lebih teratasi, dalam konteks ruang dan waktu, dari tindakan-tindakan sosial.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua hal dasar yang memiliki kaitan erat dengan kesadaran radikal, yaitu pengetahuan dan kepentingan. Pengetahuan telah

dielaborasi secara mendalam oleh berbagai teori strukturalisme, studi kritis, konstruksi sosial, dan post-strukturalisme. Manuel Castells menggunakan istilah *'knowledge society'* atau *'information society'* untuk menjelaskan bagaimana kinerja masyarakat, masyarakat digital, bertumpu pada informasi atau pengetahuan yang beredar dan didistribusikan melalui teknologi digital. Castells berpendapat bahwa:

"The network society, in the simplest terms, is a social structure based on networks operated by information and communication technologies based in microelectronics and digital computer networks that generate, process, and distribute information on the basis of the knowledge accumulated in the nodes of the networks" (Castells, 2005;7).

Sementara itu, Foucault berpendapat bahwa *"knowledge is everywhere"* dan *"comes from everywhere"* (Foucault, 1998; 68). Infrastruktur digital dan *big data* dapat diakses oleh semua aktor digital yang memberikan pengetahuan dan informasi untuk beberapa kepentingan. Lupton menggunakan pemikiran Foucault tentang pengetahuan untuk melihat bahwa pengetahuan tidak lagi berada dalam batas posisi struktural, tetapi disebarkan dan dimiliki oleh jaringan masyarakat digital. Oleh karena itu, terdapat penyebaran kekuasaan yang diperoleh dari pengetahuan. Lupton berpendapat bahwa

"...instead of the structural model of power that tended to represent societies as systems of largely fixed hierarchies, this approach views power as horizontal, rhizomatic, fluid and dynamic. The mass media are no longer viewed and theorised as 'top-down' mass persuaders, able to manipulate the masses to which they are disseminated and representative of the monopolistic concentration of power over public representations" (Lupton, 2015;22).

Kepentingan merupakan bagian lain dari kesadaran radikal yang telah dipelajari oleh para ahli ilmu sosial seperti George Simmel, Max Weber dan Pierre Bourdieu. Namun, studi tentang kepentingan belum menemukan konsep komprehensif yang dapat menjelaskan peran pentingnya dalam tindakan aktor sosial. Richard Swedberg adalah seorang sosiolog kontemporer yang menginisiasi kembali konsep kepentingan yang signifikan dalam ilmu sosial. Swedberg melacak konsep minat sebagai kekuatan pendorong dan kekuatan utama (Swedberg, 2005). Menurut Swedberg, ilmuwan sosial klasik dan kontemporer menempatkan kepentingan sebagai daya penentu (*driving force*) dan daya berpengaruh (*major force*) tindakan-tindakan para aktor sosial. Kepentingan adalah kodrat manusia yang menjadi

penggerak atau kekuatan utama dari tindakan sosial. Namun masih belum ada definisi yang dijabarkan secara sosiologis. Oleh karena itu, merujuk Susan, kepentingan adalah keinginan subyektif atau keinginan yang harus atau tidak harus dipenuhi oleh sumber daya, baik materi maupun nonmateri (Susan, 2019). Terdapat empat komponen kepentingan yaitu keinginan subyektif, tingkat pemenuhan (keharusan atau ketidakharuan), dan sumber daya baik materi maupun non materi. Kesadaran para aktor sosial mengandung kepentingan dengan empat komponen tersebut. Namun, proposisi teoritis ini masih sangat dini sehingga perlu digali secara empiris dan teoritis.

Kesadaran radikal masyarakat digital merupakan model komponen sosiologis utama dari modal sosial saat ini. Definisi Pierre Bourdieu tentang modal sosial adalah jaringan sosial para aktor, individu atau kelompok, dalam masyarakat tertentu dengan sumber daya aktual atau virtual yang dipertahankan dan dilembagakan dalam tindakan resiprokal — hubungan, dan rekognisi (Bourdieu, dalam Bourdieu dan Wacquant, 1992; 119). Memperluas konsep Bourdieu, modal sosial dalam masyarakat digital akan hadir dalam bentuk jaringan dan batasan yang berbeda. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, infrastruktur digital pada dasarnya telah mengubah konsep ‘ruang’ dan ‘waktu’.

Teknologi digital beserta infrastrukturnya mampu menciptakan arena sosial yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, para aktor digital akan menghasilkan tindakan sosial di arena sosial yang sama bahkan di tempat yang berbeda. Seperti proposisi teoretis Giddens “*take action at distance*” (Giddens, 1994). Pada saat yang sama, kesadaran radikal masyarakat digital menciptakan gerakan yang sangat cepat, tanpa penundaan yang berarti, dan tindakan yang lebih kontroversial. Penggunaan bahasa yang merepresentasikan pengetahuan dan kepentingan di media sosial dan infrastruktur digital lainnya merupakan instrumen untuk membangun jaringan sosial, menjalin kerjasama, menggalang tindakan kolektif, solidaritas, dan merespon berbagai isu.

Seperti halnya di kancah politik Indonesia, misal jaringan mahasiswa Papua dan beberapa aktor lainnya menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi ‘monyet’ (BBB.com, 2019), sebagai bahasa rasisme yang dilakukan oleh para aktor anggota organisasi massa dan aparat militer. Sebagai bahasa, yang merepresentasikan pengetahuan dan cara mencapai kepentingan, informasi tentang rasisme terhadap mahasiswa Papua telah memobilisasi protes massa masyarakat Papua dan para aktivis hak asasi manusia. Hanya berselang beberapa hari setelah bahasa rasisme di Surabaya (18 Agustus 2019), gelombang protes mahasiswa Papua muncul di berbagai daerah. Eskalasi protes masyarakat Papua di beberapa kota Provinsi Papua selanjutnya diikuti dengan aksi kekerasan dari beberapa

kelompok yang merusak fasilitas umum dan gedung pemerintahan, serta mengintimidasi etnis non-Papua. Masalah ini merupakan bagian dari masalah keamanan siber yang perlu ditangani oleh masyarakat digital.

3. Diskursus Keamanan Siber

3.1 *Keamanan Siber Masyarakat Digital*

Keamanan siber adalah salah satu masalah krusial dalam masyarakat digital. Sebelum membahas tentang keamanan siber, perlu diperhatikan kembali bahwa masyarakat digital adalah tipe masyarakat masa kini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari aktor sosial. Oleh karena itu, keamanan siber pada dasarnya tidak terlepas dari kehidupan sosial sehari-hari. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, keamanan siber pada umumnya dipahami sebagai ancaman terhadap para aktor digital melalui serangan siber terhadap teknologi digital, atau dikenal dengan ancaman siber, seperti pengelabuan, *malware*, serangan kata sandi. Konsep keamanan siber pada dasarnya terdiri dari tiga bagian: (1) Kegiatan terukur dan dirancang, baik teknis maupun nonteknis, yang bertujuan untuk melindungi teknologi digital dari segala ancaman, termasuk ancaman terhadap keamanan nasional; (2). Tingkat perlindungan yang dihasilkan dari kegiatan dan tindakan aplikasi; (3). Asosiasi usaha profesional, termasuk penelitian dan analisis, bertujuan untuk mengimplementasikan dan meningkatkan kualitasnya (Mathew, 2016; 208-209).

Mathew berpendapat bahwa keamanan siber dapat dikategorikan menjadi empat isu, antara lain: (1). Keamanan siber sebagai masalah teknologi informasi; (2) Keamanan siber sebagai masalah ekonomi; (3) Keamanan siber sebagai masalah penegakan hukum; dan (4) Keamanan siber adalah masalah keamanan nasional (Mathew, 2016; 209). Kategorisasi isu pada dasarnya berakar pada ancaman terhadap teknologi digital. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tulisan ini memperluas konsep ancaman. Ancaman tersebut tidak hanya soal pembajakan atau pengelabuan terhadap teknologi digital, infrastruktur digital, tetapi kemampuan dan kepentingan para aktor digital untuk menciptakan kekerasan melalui konstruksi, produksi dan reproduksi, bahasa. Kerusuhan sosial, kekerasan, baik vertikal maupun horizontal, dan teror merupakan konsekuensi lebih lanjut dari konstruksi bahasa dalam infrastruktur digital. Oleh karena itu, studi keamanan siber perlu memperluas cakupan analisisnya.

Sementara konsep keamanan siber terpusat pada ancaman teknologi informasi dan digital, ilmu sosial dapat membawa atau melengkapi studi keamanan siber yang berfokus

pada konsekuensi konstruksi bahasa aktor digital dalam infrastruktur digital terhadap konsep keamanan. Konsekuensi dari konstruksi bahasa, khususnya, memahami masalah keamanan dalam masyarakat digital. Tulisan ini melihat kekerasan yang mungkin terjadi akibat konstruksi bahasa dalam infrastruktur digital sebagai ancaman keamanan masyarakat digital.

Ilmu sosial, terutama studi perdamaian dan konflik, telah mengembangkan teori kekerasan sejak Max Weber, Pierre Bourdieu, Johan Galtung dan John Keane. Pierre Bourdieu adalah salah satu ilmuwan sosial terkemuka yang telah menerapkan perspektif yang relevan untuk menganalisis kekerasan dalam masyarakat digital. Pierre Bourdieu menciptakan konsep kekerasan simbolik yang terjadi dalam perbedaan kekuasaan antara aktor sosial, baik individu maupun kelompok (Bourdieu, dkk, 2014). Kekerasan simbolik tersebut berbentuk gestur atau bahasa tubuh, presentasi diri, dan gaya hidup atau identitas. Infrastruktur digital, media online, blog dan media sosial, telah memberikan ruang baru yang dapat digunakan untuk menyebarkan kekerasan simbolik. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa masyarakat digital bercirikan kesadaran radikal dengan konstruksi bahasa para aktor digital. Kesadaran radikal para aktor digital sosial menyebarkan bahasa dan informasi yang mampu mempengaruhi, memprovokasi atau mengintimidasi orang lain, untuk dibaca dan diserap oleh masyarakat.

3.2 Kasus Rasisme

Kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua bermula dari pernyataan beberapa anggota ormas yang mengikuti aksi unjuk rasa di asrama mahasiswa Papua pada 18 Agustus 2019. Berdasar observasi dan wawancara penulis terhadap aparat kepolisian, mahasiswa Papua yang berada di asrama tersebut telah merobek Bendera Indonesia dan kemudian dibuang ke saluran pembuangan. Selain itu, salah satu anggota organisasi massa menyatakan bahwa mahasiswa Papua telah merusak bendera Indonesia dan membuangnya ke saluran pembuangan. Pernyataan anggota organisasi massa memancing lebih banyak warga di sekitar lokasi asrama mahasiswa Papua untuk memprotes dan mengutuk mahasiswa Papua di Surabaya. Pernyataan terkait perobekan bendera merupakan konstruksi bahasa dengan kesadaran radikal yang diterima oleh jejaring sosial pendukung nasionalisme Indonesia. Usai pernyataan itu, beberapa organisasi massa melakukan protes di depan asrama mahasiswa Papua yang diikuti sejumlah anggota Tentara negara Indonesia (TNI). Pada saat yang sama, mahasiswa Papua tidak mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi dan menjelaskan posisi mereka terkait tuduhan tersebut.

Konstruksi bahasa tentang aksi mahasiswa Papua yang merusak bendera Indonesia disebarkan dan dikomunikasikan di media sosial oleh jaringan sosial kelompok nasionalis Indonesia. Hal ini mendorong rangkaian protes oleh beberapa ormas seperti FPI (Front Pembela Islam) dan warga di sekitar asrama mahasiswa Papua. Namun, seperti dimuat BBC, mahasiswa Papua menyatakan bahwa pada hari terjadinya rasisme, sebagian besar aktor yang mengepung asrama adalah aparat TNI, Satpol Pamong Praja, dan beberapa warga atau beberapa anggota organisasi massa (BBC.com, 2019).

Pada saat terjadinya protes, warga sekitar lokasi dan beberapa aparat TNI mengaku bahwa praktik rasisme dilakukan oleh salah satu anggota organisasi massa dan aparat TNI. Rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menggunakan bahasa “Kamu Kera”. Bahasa rasisme, pada gilirannya, menyebar sebagai kekerasan simbolik terhadap mahasiswa Papua. Bahasa rasisme tersebar melalui media massa dan media sosial, termasuk Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Bahasa rasisme menempatkan mahasiswa Papua sebagai korban. Selanjutnya, Veronika Koman adalah bagian dari konstruksi bahasa terkait mahasiswa Papua sebagai korban rasisme. Konstruksi bahasa korban rasisme terhadap mahasiswa Papua diterima oleh jaringan sosial masyarakat Papua. Hal tersebut telah memobilisasi solidaritas kolektif masyarakat Papua. Protes di Papua, baik di Provinsi Papua maupun di Papua Barat, yang menentang bahasa rasisme berlangsung sangat besar. Situasi semakin memburuk dengan adanya tindak kekerasan dan kerusuhan di beberapa kota di Papua seperti Wamena dan Jayapura.

Isu nasionalisme dan rasisme telah ditangkap oleh modal sosial masyarakat digital yang memiliki kesadaran radikal di Indonesia. Modal sosial masyarakat digital jelas tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik. Konstruksi bahasa, sebagai informasi yang berpengaruh, dibawa oleh kesadaran radikal pemilik modal sosial. Konsekuensi dari penyebaran bahasa baik nasionalisme dan anti rasisme adalah jaringan aksi solidaritas yang dihasilkan sangat cepat dan tidak terbatas. Dalam hal ini, kesadaran radikal mampu menciptakan kekerasan. Kekerasan tahap pertama adalah kekerasan simbolik, kemudian diikuti oleh kekerasan fisik yang terlihat melalui perusakan fasilitas umum dan pembunuhan terhadap 26 warga non-etnis Papua di Wamena (Detiknews.com, 2019). Berdasarkan pada analisis ini, modal sosial masyarakat digital dengan kesadaran radikal berpotensi menciptakan ketidakamanan dalam masyarakat digital.

4. Kesimpulan

Ilmu sosial telah menemukan bahwa pada dasarnya, modal sosial dapat difungsikan sebagai instrumen yang konstruktif dan sekaligus destruktif, seperti halnya dengan modal sosial masyarakat digital. Namun, modal sosial masyarakat digital memiliki lebih banyak komponen sosiologis. Komponen tersebut meliputi (1) Kesadaran radikal; (2) Konstruksi bahasa sebagai cara dan informasi yang berpengaruh; dan (3) Tindakan sosial dengan batas teritorial yang lebih sedikit. Kesadaran radikal, dengan bahasa—pengetahuan dan kepentingannya, berperan sebagai mode tindakan sosial. Mode tindakan sosial berada pada konstruksi bahasa yang tersebar melalui media sosial dan infrastruktur digital lainnya. Konstruksi bahasa, misal pada jaringan mahasiswa Papua dan beberapa ormas di Surabaya terkait rasisme dan nasionalisme, menjadi instrumen untuk menggalang dukungan, membangun solidaritas, pertukaran informasi dan justifikasi kekerasan. Sedangkan aksi sosial secara simultan dilibatkan dalam infrastruktur digital dan ruang publik.

Konstruksi bahasa membawa informasi yang berpengaruh terkait bahasa rasisme dan reaksi nasionalisme dari modal sosial yang berbeda. Setiap konstruksi bahasa didistribusikan, diterima, dan dibenarkan oleh anggota jaringan sosial tertentu. Masalahnya kemudian adalah beberapa konstruksi bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan kemarahan dan kebencian sosial. Para aktor digital atau anggota jaringan sosial, yang dapat mengakses bahasa dari mana saja, terdorong oleh kesadaran radikal untuk segera merespon. Hal inilah yang menyebabkan protes massa dan gerakan solidaritas yang terbentuk sangat cepat.

Kesadaran radikal dan konstruksi bahasa dengan informasi instan (cepat) telah menjadi ancaman bagi keamanan digital. Indikator keamanan masyarakat digital adalah tidak adanya kekerasan yang membahayakan kehidupan damai masyarakat. Kesimpulan dari tulisan ini menekankan bahwa keamanan siber tidak hanya dilihat dari ancaman isu teknologi tetapi juga dari ancaman kesadaran radikal dari modal sosial masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, David, A. 1997. The concept of security. *Review of International Studies* (1997), 23, 5-26. Diakses 5 Oktober 2019 dari [https://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20\(1997\)%20The%20Concept%20of%20Security.pdf](https://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1997)%20The%20Concept%20of%20Security.pdf).
- Berger, P. L. & T. Luckmann. 1966. *The Social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L., J., D. 1992. *An invitation to reflexive sociology*, Chicago: University of Chicago Press.

- Bourdieu, P. 1999. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu, P., dkk. 2014. *Reproduction in education, society, and culture*. Los Angeles; London; New Delhi; Singapore; Washington, D.C.: Sage.
- BBC.com. (19 Agustus 2019). “Manokwari rusuh : 'Kami orang Papua dikatakan sebagai monyet’”. Diakses 5 Juli 2021 <https://www.bbc.com/indonesia/media-49399008>.
- Castells, M. 2005. *The network society: From knowledge to policy*. In Castells, M. and Gustavo, C., eds., *The Network Society: From Knowledge to Policy*. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations.
- Chen, W., 2013. *The implication of social capital for the digital divides in America*. (The Information Society. An International Journal, 29:1, 13-25)
- Detiknews.com. (24 September 2019). “Kapolri: Korban Tewas Rusuh Wamena 26 Orang, 22 di Antaranya Pendatang”. Diakses 5 Juli 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-4719655/kapolri-korban-tewas-rusuh-wamena-26-orang-22-di-antaranya-pendatang>.
- Foucault, M. 1998. *The history of sexuality: The will to knowledge*. London: Penguin.
- Giddens, A. 1994. *Beyond left and right: The future of radical politics*. UK: Stanford University Press.
- Habermas, J. 1987. *Theory of communicative action, Volume Two: Lifeworld and system: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press.
- Kingori, Duncan. 2019. *Top Ten Cybersecurity Risks in 2019*. Diakses pada 7 Oktober 2019 from <https://www.uscybersecurity.net/risks-2019/>.
- Kompas.com. (6 Oktober 2019). “Penetapan Tersangka Veronica Koman, dari Tuduhan Polisi hingga Kritik Bikin Takut Masyarakat Bersuara”. Diakses 6 Oktober 2019 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/07354401/penetapan-tersangka-veronica-koman-dari-tuduhan-polisi-hingga-kritik-bikin?page=all>.
- Lupton, Deborah. 2015. *Digital Sociology*. New York: Routledge.
- Mathew, F.O. 2016. *Sociological and technological factors that enhance cybercrime and cyber security in Nigeria*. (International Journal of Law and Legal Studies. Vol. 4 (5), pp. 207-216)
- Ragnedda, M. & Ruiu, M.L., 2017. Social capital and the three levels of digital divide. In Ragnedda M., Muschert G. eds. (2017), *Theorizing Digital Divides*, Routledge, pp. 21-34.
- Suara.com. (29 September 2019). “MUI Minta Pemerintah Tegas Usut Rusuh Wamena yang Tewaskan 33 Orang”. Diakses 6 Oktober 2019 dari <https://www.suara.com/news/2019/09/29/092154/mui-minta-pemerintah-tegas-usut-rusuh-wamena-yang-tewaskan-33-orang>.
- Susan, N. 2019. *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Swedberg, R. 2005. *Can there be a sociological concept of interest? Theory and society*. 34: 359–390.